

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pengertian tersebut ialah salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 sebagai prinsip negara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Secara historis, negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak (*Machtsstaat*) berdasarkan kekuasaan belaka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, dalam rangka mencegah pencurian kayu jati di wilayah hukum Polres Blora ?
2. Bagaimanakah Strategi pembinaan hukum terhadap masyarakat sekitar hutan di wilayah hukum Polres Blora
3. Bagaimanakah pengaruh pembinaan masyarakat sekitar hutan (Yuridis Empiris) dan penegakan hukum / penindakan (Yuridis Formal) terhadap para pelaku pencurian kayu jati dalam rangka harkamtibmas di wilayah hukum Polres Blora ?

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan. Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologis. Kemudian untuk penindakan atau penerapan sanksi hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka sistem yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat sekitar hutan wilayah hukum Polres Bora mengaku tidak pernah takut terhadap apa yang dilakukannya sekalipun perbuatannya itu dinyatakan melanggar hukum. Pengaruh dari pembinaan serta pemidanaan terhadap warga masyarakat di sekitar hutan yang pernah melakukan pencurian kayu jati (Illegal logging) tidak terlalu dihiraukan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan khususnya tentang pencurian kayu jati yang sering diakukan oleh masyarakat sekitar hutan wilayah kabupaten Blora yaitu sebagai berikut: Kemiskinan, kurangnya sumberdaya manusia, tidak ada sumber penghasilan lain.

Kata Kunci :StrategiPembinaanmasyarakatdankebijakanhukum illegal logging

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state is a republic which is a state law. Such understanding is one of the basic principles that have confirmation in 1945 as a state principle. The principle contained in Article 1 (3) of the 1945 Constitution, which states that Indonesia is a country of law. Historically, state law is the state of idealized by the Founding Fathers as outlined in the 1945 general explanation about the system of government, which stated that the Indonesian state is based on law (Rechtsstaat), not (machtsstaat) based on sheer power.

Based on the description above, the problem can then be formulated as follows:

1. How does the criminal law policy for the perpetrators of the crime of illegal logging by Act No. 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction, in order to prevent theft of teak in the jurisdiction of Police Blora?
2. How is the development strategy of the law against forest communities in the jurisdiction of Police Blora
3. How will the development of forest communities (Juridical Empirical) and law enforcement / prosecution (Juridical Formal) against the perpetrators of the theft of teak in order harkamtibmas in the jurisdiction of Police Blora?

A primary issue in this study is the policy of criminal law in the prevention of the crime of Illegal Logging and penalties imposed on offenders, as outlined in Act 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. Goal of this research is directed toward policy issues in defining and formulating prevention of the crime of Illegal Logging using juridical empirical approach or a sociological approach. Then for prosecution or sanction using normative juridical approach, the system used in this activity is to research an inventory of positive law is a fundamental preliminary activities to conduct legal research

The result showed that the forest dwellers Police jurisdiction Bora claim was never afraid of what he was doing even if his actions were declared illegal. The influence of supervision and punishment against the residents of forest communities who have committed theft of teak (illegal logging) is not too ignored.

There are several factors that cause security problems, especially about the theft of teak wood is often carried out by forest communities Blora district is as follows: Poverty, lack of human resources, there are no other sources of income

Keyword : Community development and criminal low policy